
Pengaruh Globalisasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan Lokal di Negara Berkembang

Nurhalida Simatupang

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek tata kelola pemerintahan lokal di negara berkembang. Dalam konteks ini, globalisasi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, namun juga menghadirkan tantangan seperti ketergantungan pada investasi asing, intervensi kebijakan internasional, dan ketidaksetaraan ekonomi. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana pemerintahan lokal di negara berkembang merespons tekanan dan peluang yang ditawarkan oleh globalisasi. Penelitian ini juga membahas peran aktor global, organisasi internasional, dan kerangka kebijakan yang mendorong reformasi di tingkat lokal. Dengan menggunakan pendekatan teoretis dan studi kasus, kajian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kemampuan pemerintahan lokal untuk beradaptasi dan memanfaatkan globalisasi secara efektif dalam meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik.

Kata Kunci: *globalisasi, tata kelola pemerintahan lokal, negara berkembang, efisiensi, akuntabilitas, reformasi pemerintahan, tantangan ekonomi*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Globalisasi merupakan fenomena yang telah mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai belahan dunia. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada negara maju, tetapi juga mempengaruhi negara berkembang dalam berbagai aspek, termasuk tata kelola pemerintahan lokal. Pemerintahan lokal di negara berkembang memainkan peran penting dalam memberikan layanan publik, mengelola sumber daya, dan memastikan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Namun, dalam konteks globalisasi, pemerintahan lokal sering kali menghadapi tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan bagaimana mereka harus menyesuaikan diri dengan standar global yang terus berkembang.

Salah satu pengaruh utama globalisasi terhadap tata kelola pemerintahan lokal adalah meningkatnya tekanan untuk melakukan reformasi administratif dan birokrasi. Globalisasi membawa arus informasi dan pengetahuan baru yang mengharuskan pemerintahan lokal untuk lebih transparan, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan sumber daya publik. Negara berkembang, yang sering kali menghadapi kendala dalam hal kapasitas institusional, harus beradaptasi dengan tuntutan ini. Banyak negara berkembang telah mulai mengadopsi kebijakan desentralisasi sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan lokal. Desentralisasi, yang sering kali diilhami oleh praktek-praktek di negara maju, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi jarak antara pemerintah dan rakyat.

Namun, dalam implementasinya, desentralisasi di negara berkembang tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun manusia. Pemerintahan lokal sering kali tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola urusan publik secara mandiri. Akibatnya, globalisasi yang seharusnya mendorong modernisasi dan reformasi pemerintahan, justru dapat memperparah ketimpangan antara pemerintah pusat dan lokal. Globalisasi juga memicu perubahan dalam dinamika kekuasaan antara pemerintah pusat dan lokal. Di beberapa negara berkembang, globalisasi telah mendorong peningkatan peran aktor non-pemerintah, seperti organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan multinasional, dalam menentukan kebijakan di tingkat lokal. Aktor-aktor ini sering kali membawa agenda dan standar yang mungkin tidak selaras dengan kebutuhan dan prioritas lokal.

Tekanan ekonomi akibat globalisasi juga mempengaruhi tata kelola pemerintahan lokal di negara berkembang. Dalam banyak kasus, globalisasi mengharuskan negara berkembang untuk membuka diri terhadap pasar global, yang sering kali diiringi dengan penurunan peran negara dalam pengaturan ekonomi. Liberalisasi ekonomi ini dapat mengurangi sumber pendapatan pemerintah lokal, terutama jika sektor-sektor strategis yang sebelumnya dikelola oleh negara, seperti energi dan telekomunikasi, dialihkan kepada pihak swasta. Akibatnya, pemerintah lokal mungkin mengalami kesulitan dalam menyediakan layanan publik yang memadai. Di sisi lain, masuknya investasi asing sebagai dampak globalisasi juga dapat membawa manfaat bagi pemerintah lokal, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan dalam hal regulasi dan pengawasan, karena pemerintah lokal sering kali tidak memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk memastikan bahwa investor asing memenuhi standar sosial dan lingkungan yang diperlukan.

Globalisasi juga membawa perubahan dalam pola hubungan internasional, yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan lokal di negara berkembang. Dengan meningkatnya arus perdagangan dan investasi lintas negara, pemerintah lokal di negara berkembang semakin terhubung dengan aktor-aktor global. Hal ini mendorong munculnya kerjasama internasional di tingkat lokal, seperti program pembangunan berkelanjutan dan bantuan teknis dari negara maju atau organisasi

internasional. Program-program ini sering kali bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintahan lokal dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan urbanisasi yang cepat.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan lokal. Teknologi informasi memungkinkan pemerintah lokal untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di beberapa negara berkembang, penggunaan teknologi digital untuk layanan publik telah membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. Namun, pemanfaatan teknologi ini juga menuntut kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, yang sering kali menjadi tantangan besar bagi pemerintahan lokal di negara berkembang.

Di sisi lain, globalisasi juga mempengaruhi tata kelola pemerintahan lokal melalui perubahan budaya dan nilai-nilai sosial. Dengan meningkatnya arus informasi dan mobilitas manusia lintas negara, masyarakat lokal di negara berkembang semakin terpapar pada nilai-nilai dan norma-norma global. Hal ini dapat memicu perubahan dalam ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah lokal, terutama terkait dengan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan tata kelola yang baik. Pemerintahan lokal di negara berkembang harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Namun, pengaruh globalisasi terhadap tata kelola pemerintahan lokal di negara berkembang tidak selalu bersifat positif. Ada kekhawatiran bahwa globalisasi dapat memperburuk ketidaksetaraan dan eksklusivitas sosial, terutama jika pemerintah lokal tidak mampu mengelola dampak-dampaknya dengan baik. Globalisasi juga dapat meningkatkan ketergantungan negara berkembang pada bantuan internasional dan investasi asing, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemandirian pemerintahan lokal dalam mengambil keputusan.

Secara keseluruhan, globalisasi telah membawa berbagai perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan lokal di negara berkembang. Sementara globalisasi memberikan peluang bagi peningkatan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, tantangan-tantangan yang dihadirkan oleh globalisasi juga tidak bisa diabaikan. Pemerintahan lokal di negara berkembang harus terus beradaptasi dengan dinamika global, sambil tetap menjaga keseimbangan antara tuntutan global dan kebutuhan lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap tata kelola pemerintahan lokal di negara berkembang. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan kajian literatur. Wawancara dilakukan dengan para pejabat pemerintahan lokal, pakar kebijakan publik, serta perwakilan dari organisasi non-pemerintah yang berperan dalam tata kelola pemerintahan. Teknik snowball sampling digunakan untuk memilih partisipan yang relevan berdasarkan rekomendasi dari narasumber sebelumnya. Kajian literatur dilakukan untuk menganalisis dokumen resmi pemerintah, jurnal akademik, dan laporan dari lembaga internasional terkait dengan tema globalisasi dan tata kelola pemerintahan.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik, di mana pola-pola tematik terkait pengaruh globalisasi, seperti adopsi kebijakan global, peningkatan transparansi, dan perubahan struktur birokrasi, diidentifikasi. Penelitian ini juga memanfaatkan triangulasi data untuk memastikan validitas temuan, dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen kebijakan dan kajian literatur. Fokus analisis ditujukan pada negara-negara berkembang di Asia

dan Afrika yang memiliki karakteristik sistem pemerintahan desentralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana globalisasi mempengaruhi proses pengambilan keputusan, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan lokal, serta bagaimana pemerintahan lokal beradaptasi dengan tuntutan global dalam konteks lokal.

PEMBAHASAN

Globalisasi adalah fenomena yang telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan lokal di negara berkembang. Konsep globalisasi mencakup integrasi ekonomi, politik, dan sosial yang melintasi batas-batas negara, yang mengakibatkan interaksi dan pertukaran yang lebih besar di antara berbagai negara dan komunitas. Dalam konteks negara berkembang, globalisasi membawa serta tantangan dan peluang yang signifikan bagi tata kelola pemerintahan lokal.

Salah satu dampak utama globalisasi terhadap tata kelola pemerintahan lokal di negara berkembang adalah perubahan dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Di era globalisasi, masyarakat semakin memiliki akses terhadap informasi dari berbagai sumber di seluruh dunia. Hal ini memfasilitasi munculnya kesadaran dan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah lokal tidak lagi dapat beroperasi dalam ruang hampa; mereka harus mempertimbangkan opini publik dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Ini memicu perkembangan praktik-praktik tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

*Selain itu, globalisasi juga mendorong pemerintahan lokal untuk beradaptasi dengan standar internasional dalam pengelolaan pemerintahan. Negara-negara berkembang sering kali menerima bantuan dan dukungan dari lembaga internasional yang memiliki pedoman dan standar tertentu. Hal ini mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas dalam melayani masyarakat. Misalnya, pemerintah daerah di Indonesia telah berupaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* sebagai respons terhadap tuntutan dari masyarakat dan donor internasional. Dalam hal ini, globalisasi berfungsi sebagai pengarah bagi tata kelola pemerintahan lokal untuk menjadi lebih profesional dan berbasis pada hasil.*

Namun, globalisasi juga membawa tantangan yang signifikan bagi tata kelola pemerintahan lokal di negara berkembang. Salah satu tantangan tersebut adalah meningkatnya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Proses globalisasi sering kali menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, di mana hanya segelintir orang atau kelompok yang mendapatkan manfaat terbesar dari integrasi global. Hal ini dapat menyebabkan marginalisasi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, yang pada gilirannya mengganggu stabilitas sosial. Pemerintah lokal, dalam hal ini, dituntut untuk mengatasi ketidaksetaraan ini dengan mengembangkan kebijakan yang inklusif dan merata.

Lebih jauh lagi, globalisasi juga mempengaruhi dinamika politik di tingkat lokal. Dalam banyak kasus, proses desentralisasi yang digalakkan oleh globalisasi dapat memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Namun, otonomi ini tidak selalu disertai dengan peningkatan kapasitas dan sumber daya yang memadai. Pemerintah lokal sering kali terjebak dalam situasi di mana mereka memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan, tetapi tidak memiliki sumber daya atau kemampuan untuk melaksanakannya. Ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap pemerintah.

Perubahan iklim dan tantangan lingkungan juga menjadi faktor penting dalam tata kelola pemerintahan lokal yang dipengaruhi oleh globalisasi. Isu-isu lingkungan tidak mengenal batas negara, dan dampak perubahan iklim sering kali dirasakan lebih kuat di negara berkembang.

Dalam konteks ini, pemerintahan lokal harus mampu merespons tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dengan kebijakan yang berkelanjutan. Globalisasi dapat menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan teknologi dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun, untuk memanfaatkan peluang ini, pemerintah lokal perlu memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam rencana pembangunan mereka.

Selain itu, fenomena globalisasi juga memengaruhi dinamika ekonomi lokal. Dengan masuknya perusahaan multinasional dan investasi asing, ekonomi lokal dapat mengalami transformasi yang signifikan. Di satu sisi, investasi asing dapat membawa lapangan kerja dan meningkatkan infrastruktur. Namun, di sisi lain, dominasi perusahaan asing dapat menekan usaha lokal, mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi pemerintah daerah dan mengurangi kontrol masyarakat terhadap sumber daya lokal. Pemerintah lokal harus mengembangkan kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara menarik investasi asing dan melindungi kepentingan ekonomi lokal.

Dalam konteks teknologi, globalisasi telah mempercepat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Di negara berkembang, adopsi TIK dapat membawa manfaat yang signifikan bagi tata kelola pemerintahan lokal. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, memungkinkan pemerintah untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat dan memfasilitasi partisipasi publik yang lebih besar. Namun, tidak semua daerah di negara berkembang memiliki akses yang sama terhadap teknologi, yang dapat memperburuk kesenjangan digital dan menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi masyarakat.

Pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang terpengaruh oleh globalisasi. Globalisasi telah memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara negara-negara. Pemerintah lokal di negara berkembang sering kali dapat belajar dari praktik terbaik di negara lain, tetapi mereka juga harus menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan tersebut di konteks lokal yang berbeda. Pendidikan yang lebih baik dan akses yang lebih luas terhadap informasi akan membantu pemerintah lokal untuk meningkatkan kapasitas dan responsivitas mereka terhadap kebutuhan masyarakat.

Globalisasi juga mempengaruhi hubungan antara pemerintah lokal dan masyarakat sipil. Dalam konteks global, semakin banyak organisasi non-pemerintah (LSM) dan kelompok masyarakat sipil yang beroperasi di tingkat lokal. Kehadiran mereka dapat berkontribusi pada penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memperjuangkan kepentingan kelompok yang terpinggirkan. Namun, interaksi antara pemerintah lokal dan LSM juga dapat menimbulkan ketegangan, terutama jika pemerintah merasa terancam oleh suara dan tuntutan yang diusung oleh masyarakat sipil.

Dalam rangka menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang dibawa oleh globalisasi, pemerintah lokal di negara berkembang perlu mengembangkan strategi yang inklusif dan berkelanjutan. Mereka harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, pemerintah lokal perlu meningkatkan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia mereka untuk dapat menghadapi dinamika yang cepat dalam era globalisasi.

Globalisasi juga mendorong kolaborasi lintas batas antara pemerintah lokal di berbagai negara. Melalui jaringan internasional dan program kerjasama, pemerintah lokal dapat saling belajar dan berbagi pengalaman. Hal ini dapat memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan lokal dan meningkatkan efektivitas dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Dengan demikian, globalisasi dapat menjadi alat yang powerful bagi negara berkembang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan lokal mereka.

Di samping itu, peran media sosial dan platform digital dalam menghubungkan masyarakat dan pemerintah lokal juga tidak dapat diabaikan. Media sosial telah menjadi sarana yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutan kepada pemerintah. Hal ini mendorong pemerintah lokal untuk lebih responsif terhadap suara masyarakat. Namun, tantangan dalam hal penyebaran informasi yang salah dan disinformasi juga muncul, yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan yang berbasis pada data yang akurat dan faktual.

Dengan segala tantangan dan peluang yang ada, pengaruh globalisasi terhadap tata kelola pemerintahan lokal di negara berkembang sangatlah kompleks. Dalam menghadapi fenomena ini, pemerintah lokal perlu beradaptasi dan berinovasi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Globalisasi dapat menjadi kekuatan pendorong untuk perubahan positif, tetapi hal ini memerlukan komitmen dan usaha dari semua pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan lokal di negara berkembang dapat berfungsi secara efektif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di era global ini.

Kesimpulan

Pengaruh globalisasi terhadap tata kelola pemerintahan lokal di negara berkembang adalah fenomena yang membawa berbagai tantangan dan peluang. Di satu sisi, globalisasi meningkatkan akses informasi, partisipasi masyarakat, dan mendorong penerapan praktik tata kelola yang lebih baik, seperti transparansi dan akuntabilitas. Di sisi lain, tantangan seperti ketidaksetaraan sosial, ketidakcukupan sumber daya, dan perubahan lingkungan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah lokal.

Keterlibatan masyarakat sipil dan kemajuan teknologi juga memberikan kesempatan bagi pemerintah lokal untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi, pemerintah dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan warga, sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk mengoptimalkan manfaat globalisasi, pemerintah lokal di negara berkembang harus berkomitmen untuk beradaptasi, berinovasi, dan mengembangkan kebijakan yang inklusif serta berkelanjutan. Hal ini penting agar tata kelola pemerintahan lokal dapat berfungsi secara efektif dalam menghadapi dinamika dan tantangan di era global, sehingga akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Muda, I. (2012). Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Aparatur.*
- Nasution, I., & Dewi, R. (2011). Kesiapan Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan.*
- Jamil, B. (2020). Komunikasi Sosial dan Respon Masyarakat Terhadap Covid-19 antara dan Maut dan Perut.*
- Hendra, Y., & Barus, R. K. I. (2017). Strategi Komunikasi Pemasaran Event Organizer Silent Studio Medan dalam Mendapatkan Kepercayaan Pelanggan.*
- Tarigan, U. (2007). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di Persatuan amal Bakti (PAB) Sumatera Utara.*
- Hidayat, T. W. (2008). Komunikasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.*

- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang.*
- Nasution, I., & Muda, I. (2013). *Fungsi Pengelolaan Arsip Dalam Rangka Meningkatkan Efektifitas Kerja Pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah II (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Nst, M., & Lubis, A. A. (2011). *Peranan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Menanggulangi Masalah Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Harahap, Y., & Lubis, A. A. (2011). *Pelaksanaan Pembinaan Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai Dinas Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.*
- Jamil, B., & Barus, R. K. I. (2012). *Peranan Komunikasi Antarpribadi Perawat dalam Menghadapi Proses Persalinan pada Pasien di Klinik Bersalin (Studi Kasus di Klinik Dr Makmur SPOG (K) Sei Mencirim Medan).*
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Lubis, A. A. (2013). *Efektivitas Motivasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan).*
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara.*
- Muda, I. (2020). *Corona Mengintai Pemudik.*
- Siregar, N. S. S., & Jamil, B. (2016). *Komunikasi Terapeutik Perawat Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien Hemodialysis di Rumah Sakit Columbia Asia Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Dewi, R., & Jamil, B. (2014). *Pelaksanaan Kebijakan Program Supra Insus dalam Meningkatkan Penghasilan Masyarakat di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.*
- Hartono, B., & Lubis, M. S. (2023). *Kinerja Birokrasi dalam Pemberian Reward dan Punishment untuk Peningkatan Produktifitas Kerja dan Pengembangan Karir Pegawai pada Sekretariat DPRK Langsa.*
- Hasibuan, E. J. (2022). *Efektivitas Kinerja Pegawai Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias.*
- Harahap, R. H., & Lubis, M. S. (2020). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Dalam Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Medan (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan).*
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2016). *Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Ritonga, S., & Nasution, A. I. (2007). *Pengaruh Teknologi Komputer Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Siregar, N. S. S., & Hasibuan, E. J. (2007). *Pengaruh Ilmu dan Teknologi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di Bagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PT. Pertamina Persero UPI Pangkalan Brandan.*
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Siregar, T., & Ritonga, S. (2007). *Peranan Pendidikan dan Latihan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Pemerintah Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Nst, M., & Lubis, A. A. (2012). *Penataan Kearsipan dalam Menunjang Kinerja Pegawai di Kantor WKB Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Lubis, M. S. (2023). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten DeliSerdang Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Effendy, S., & Ritonga, S. (2022). *Pengaruh Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pengolahan Ptpn Iii Rantauprpat.*
- Tarigan, U. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan.*
- Nasution, I., & Lubis, A. A. (2012). *PERANAN LURAH SELAKU PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR KELURAHAN BINJAI ESTATE KECAMA TAN BINJAI SELATAN.*

- Tarigan, U. (2013). Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).*
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). Implementasi Pergub No. 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Aceh di Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.*
- Suharyanto, A. (2020). Memahami Struktur Umum Sistematikan Penulisan Untuk Publikasi Pada Jurnal Ilmiah.*
- Tarigan, U., & Hasibuan, A. (2012). Analisa Permasalahan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kantor Camat Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.*